

## Politik etis dan priayi baru: mobilitas masyarakat di Pulau Jawa 1900-1942

Jati Saputra Nuriansyah<sup>1\*</sup>, Ahmad S. Paramasatya<sup>2</sup>, Reo Rafienza<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, jati.saputra.2007326@students.um.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, ahmad.paramasatya@mail.ugm.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281,, reo.rafienna@mail.ugm.ac.id

\***Corresponding email:** jati.saputra.2007326@students.um.ac.id

### Abstract

*This writing is motivated by the ethical political policy enacted by the Dutch Colonial government in Java. The methods used in this research include topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The result of the discussion of this article is that the new priayi in Java was caused by ethical politics implemented by the Dutch, allowing people to mobilize social status. Social status mobility through education became commonplace for ordinary people and its existence threatened the lives of the pangreh praja or old priayi. The objectives of writing this article are 1) To describe the classification of the population on the island of Java; 2) To know the government and ethical politics in Java; and 3) To describe the emergence of new priayi in Java.*

### Keywords

*Jawa, Priayi, ethical politics.*

### Abstrak

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kebijakan politik etis yang diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari pembahasan artikel ini yaitu priayi baru di Jawa diakibatkan oleh politik etis yang diterapkan oleh Belanda sehingga memungkinkan masyarakat untuk bermobilisasi status sosial. Mobilitas status sosial melalui jalur pendidikan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat biasa dan keberadaannya mengancam kehidupan para *pangreh praja* atau priayi. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan klasifikasi penduduk di Pulau Jawa; 2) Untuk mengetahui pemerintahan dan politik etis di Jawa; dan 3) Untuk menjabarkan kemunculan priayi baru di Pulau Jawa.

### Kata kunci

Jawa, priayi, politik etis.

\***Received:** June 26<sup>th</sup>, 2023

\***Revised:** July 8<sup>th</sup>, 2023

\***Accepted:** July 30<sup>th</sup>, 2023

\***Published:** July 31<sup>st</sup>, 2023

## PENDAHULUAN

Jawa, merupakan salah satu pulau bagian dari Negeri Hindia Belanda yang sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh Kolonial Belanda. Secara geografis, Pulau

Jawa memegang peranan yang sangat penting pada periode kekuasaan Kolonial Belanda. Hal ini disebabkan posisi Pulau Jawa yang berada di jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Asia Timur. Selain itu, iklim Pulau Jawa yang bersahabat, ditambah dengan tanah yang subur, menjadikan Pulau Jawa sebagai penghasil komoditas ekspor yang berkontribusi terhadap perekonomian Belanda. Beberapa komoditas tersebut, seperti tebu, kopi, teh, kina, tembakau, dan sebagainya. Hal tersebut juga tidak lepas dari kehidupan penduduk Pulau Jawa yang sangat berkontribusi terhadap budidaya komoditas ekspor hingga mempengaruhi ekonomi Belanda. Namun demikian, kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Jawa pada periode tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda seperti pembagian kelas sosial antar masyarakat.

Pemerintah Kolonial Belanda selama menguasai Jawa mengklasifikasikan penduduk ke dalam tiga kelas yang didasarkan pada ras, suku, dan/atau etnis. Ketiga kelas tersebut terdiri dari, kelas pertama penduduk Eropa, kedua penduduk Timur Asing (Orang Arab dan Cina), dan ketiga penduduk pribumi. Sementara itu, yang terjadi di Jawa pada saat itu, juga terdapat pembagian kelas sosial antar penduduk pribumi, seperti kaum elit bangsawan dan rakyat jelata (Niel, 1984). Para elit bangsawan ini telah sejak lama mewarisi dan melestarikan kekuasaan serta hak memerintah di atas rakyatnya. Ini telah dimulai jauh sejak leluhur mereka pada zaman kerajaan, seperti Mataram Islam.

Leluhur mereka mendapatkan hak untuk memerintah daerah tertentu berkaitan dengan kontrol wilayah kekuasaan kerajaan yang luas atau hubungan kekerabatan dengan raja. Mereka kemudian disebut sebagai *priayi* untuk membedakan kelas sosial dengan rakyat jelata. Namun demikian, pembagian kelas sosial yang terjadi tentunya menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, maupun pendidikan. Tidak hanya itu, Pemerintah Kolonial Belanda yang memerintah secara tidak langsung di Jawa turut memanfaatkan para elit bangsawan setempat atau *priayi* sebagai penguasa pemerintahan lokal di daerah untuk mendukung pemerintahan dan kegiatan ekonomi Kolonial Belanda. Pemerintahan tradisional yang dijalankan oleh para *priayi* tersebut menjadi alat yang ampuh untuk mengontrol dan menjaga rakyat agar tetap tunduk dengan pemerintah kolonial di satu sisi, dan untuk melanggengkan hasrat eksploitasi pemerintah di Jawa.

Nantinya, pemerintah kolonial juga menciptakan “*priayi*” baru yang lepas dari aspek-aspek tradisional dan dekat dengan ke-“Barat”-an sesuai dengan tujuan mereka. Seiring berjalannya waktu dan pergulatan pandangan politik di Parlemen Belanda, Ratu Wilhelmina dari Belanda pada September 1901 berpidato tentang “kewajiban etis dan tanggung jawab moral” bagi negeri jajahan, tidak terkecuali Hindia Belanda. Pidato tersebut kemudian menjadi awal pelaksanaan kebijakan “politik etis” yang berfokus pada pendidikan, pengairan atau irigasi, dan emigrasi atau perpindahan penduduk (Susilo & Isbandiyah, 2018). “Politik etis” tersebut memberikan akses yang luas kepada

penduduk pribumi untuk menempuh pendidikan modern *a la* Barat. Melalui pelaksanaan politik etis tersebut, menghasilkan sebuah mobilitas sosial di kalangan penduduk pribumi Jawa dan memunculkan suatu golongan atau kelas baru yang disebut “priayi baru”. Hal tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap kelas sosial yang terjadi di Jawa pada periode tersebut.

Berbagai riset yang membahas mengenai priayi telah banyak dilakukan oleh para akademisi hingga sejarawan seperti Heather Sutherland, Robert van Niel dan lain sebagainya. Dalam riset-riset tersebut membahas mengenai kehidupan sosial budaya priayi di Jawa hingga kehidupan politik mereka (Niel, 1984; Sutherland, 1983). Dari riset-riset tersebut dapat diketahui bahwa mengenai mobilitas pada masyarakat Jawa dan pengaruh munculnya priayi baru di Jawa belum banyak dibahas. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji mobilitas sosial pada masyarakat Jawa pada tahun 1900-1942. Hal tersebut guna menarasikan mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat Jawa dan pengaruhnya. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai: 1) Klasifikasi Penduduk di Jawa; 2) Pemerintahan dan Politik Etis di Jawa; 3) Kemunculan Priayi Baru.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian sejarah. Kuntowijoyo (2013) menjelaskan ada lima tahap dalam metode ini meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Dalam pemilihan topik, penulis memilih topik berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual. Tahap kedua, pengumpulan sumber atau heuristik merupakan proses mencari dan mengumpulkan sumber data atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau topik yang ditulis. Dalam proses pengumpulan sumber, penulis mengumpulkan sumber berupa sumber primer dan sekunder yang meliputi dokumen, arsip, buku, foto, artikel, dan lain sebagainya.

Tahap ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber yang merupakan tahap pengujian dan seleksi kepada sumber yang telah ditemukan. Verifikasi atau kritik sumber secara ekstern dan intern yang meliputi bahan yang digunakan hingga kebenaran informasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Tahap keempat selanjutnya adalah interpretasi yang merupakan usaha untuk memahami data yang telah diperoleh. Interpretasi terbagi menjadi dua yaitu analisis terkait informasi sumber dan sintesis dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Proses interpretasi bertujuan untuk menghubungkan informasi dari sumber-sumber yang telah diperoleh agar mendapat kesatuan informasi. Terakhir yaitu tahap historiografi yang merupakan penulisan berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan. Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting dari penggunaan metode sejarah dengan hasil akhir dari tahap ini adalah karya sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Klasifikasi Penduduk Pulau Jawa, 1900-1942

Pulau Jawa pada periode 1900 hingga 1942 merupakan salah satu pulau yang dikuasai oleh Kolonial Belanda. Secara geografis, letak Pulau Jawa sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan dunia. Bersambung dengan itu, Jawa juga memiliki populasi yang besar dan luasnya lahan produktif. sehingga Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Jawa sebagai pusat perdagangan dan pemerintahannya di Hindia Belanda. Hal tersebut berdampak bagi perkembangan penduduk yang hidup di Pulau Jawa, seperti banyaknya para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Cina yang singgah dan menetap di Jawa. Kemudian, hadirnya orang-orang Eropa di Jawa juga berdampak terhadap perkembangan penduduk di Jawa. Namun demikian, Pemerintah Kolonial Belanda mengklasifikasikan penduduk yang hidup di Pulau Jawa menjadi tiga golongan dengan pembagian yang didasarkan kepada suku, ras, dan/atau etnis. Pembagian tersebut, yaitu pada tingkatan pertama atau teratas diisi oleh penduduk Eropa, kedua diisi oleh penduduk Timur Asing seperti orang Cina dan Arab, dan ketiga atau terendah diisi oleh penduduk pribumi (Niel, 1984).

Sebagai penduduk dengan kelas tertinggi dengan populasi yang belum terlalu jamak, orang-orang Eropa memiliki kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan kelas penduduk lain. Orang-orang Eropa yang ada di Pulau Jawa pada tahun 1900-an kurang lebih berjumlah 70.000 jiwa (Niel, 1984). Satu per empat atau 25 persen dari jumlah keseluruhan tersebut merupakan orang Eropa yang lahir di Eropa dan kemudian hidup di Jawa. Penduduk Eropa yang berada di Pulau Jawa sebagian besar dipekerjakan sebagai pegawai sipil Eropa ataupun wakil-wakil dari urusan keuangan. Kemudian, 75 persen dari golongan penduduk Eropa merupakan orang-orang keturunan Indo-Eropa dan sering disebut sebagai kaum Indo.

Kaum Indo tersebut telah banyak diserap sebagai penduduk lokal dan tidak menganggap dirinya sebagai orang-orang Eropa *totok* serta menciptakan karakter budayanya sendiri yang terbentuk dari peleburan budaya tempatan dan Barat. Namun demikian, sebagian besar dari orang-orang Eropa tidak menghormati bangsa dan kebudayaan lokal penduduk pribumi (Niel, 1984). Seiring berjalannya waktu, penduduk Eropa yang tinggal di Pulau Jawa mengalami peningkatan. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1930, penduduk Eropa di Jawa berjumlah sekitar 192.571 jiwa. Berikut tabel 1 mengenai data penduduk Eropa di Pulau Jawa berdasarkan sensus penduduk 1930.

**Tabel 1. Data Penduduk Eropa di Pulau Jawa berdasarkan SP 1930**

Wilayah	Tahun	Penduduk Eropa		
		L	P	J
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1920	30.098	24.329	54.427
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		14.726	12.229	26.995

<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		2.682	2.203	4.885
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		2.617	2.386	5.003
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		23.254	19.219	42.473
Jumlah		73.377	60.366	133.743
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1930	42.606	38.168	80.774
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		18.313	16.313	34.626
<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		3.757	3.560	7.317
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		3.414	3.141	6.555
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		33.169	30.130	63.299
Jumlah		101.259	91.312	192.571

Sumber: Data diolah dari *Volkstelling 1930 Deel I, II, III*

Kemudian, golongan kelas dua merupakan penduduk Timur Asing yang terdiri dari dua kelompok etnis, yaitu etnis Cina dan etnis Arab. Penduduk etnis Cina yang tinggal di Pulau Jawa pada tahun 1900-an kurang lebih berjumlah 280.000 jiwa (Niel, 1984) dan sebagian besar dari mereka merupakan keturunan dari keluarga yang sudah turun-temurun hidup di Pulau Jawa. Sebagian besar dari penduduk etnis Cina bekerja di bidang ekonomi, seperti sebagai pedagang, syahbandar, atau penarik pajak. Hal ini terlihat bahwa mereka lebih memiliki jiwa dagang dibandingkan dengan orang-orang pribumi. Pada sisi yang lain, hal tersebut mengakibatkan struktur ekonomi di Jawa pada masa itu banyak dikuasai oleh orang-orang Cina.

Namun demikian, orang-orang Cina masih melestarikan kebudayaan mereka dengan tetap melihat negeri asal mereka sebagai kebudayaan yang dijalankan. Orang-orang Cina yang tinggal di Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat dalam sensus penduduk tahun 1930 yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, penduduk Cina yang tinggal di Pulau Jawa berjumlah 582.431 jiwa. Di bawah ini merupakan tabel 2 yang mendeskripsikan jumlah penduduk Cina di Pulau Jawa berdasarkan sensus penduduk 1930.

**Tabel 2. Data Penduduk Cina di Pulau Jawa berdasarkan SP 1930**

Wilayah	Tahun	Penduduk Cina		
		L	P	J
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1920	91.617	76.134	167.731
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		50.383	45.656	96.039
<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		4.129	3.161	7.250
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		7.316	6.507	13.823
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		55.658	43.093	98.751
Jumlah		209.103	174.511	383.614
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1930	142.575	117.143	259.718
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		68.249	62.111	130.360

<i>Gouvernement Jogjakarta</i>	6.580	5.660	12.640
<i>Gouvernement Soerakarta</i>	11.297	9.927	21.224
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>	90.829	67.660	158.489
Jumlah	319.931	262.500	582.431

Sumber: Data diolah dari *Volkstelling 1930 Deel I, II, III*

Selanjutnya, golongan kelas dua yang tinggal di Pulau Jawa adalah orang-orang etnis Arab. Meskipun yang tinggal di Jawa tidak hanya berasal dari Arab saja, melainkan orang India Muslim pun juga disebut sebagai orang Arab. Sebagai penduduk tingkat dua, penduduk Arab kurang lebih berjumlah sekitar 18.000 jiwa pada tahun 1900-an. Mereka memiliki profesi sebagai pedagang kecil, saudagar, peminjaman uang, hingga pengrajin (Wertheim, 1955). Orang-orang Arab menjadi saingan besar orang-orang Cina dalam hal berdagang. Hal ini disebabkan orang Arab memiliki hubungan yang lebih dekat dengan penduduk pribumi karena kesamaan agama yang mereka anut.

Orang Arab dikenal di Jawa dikenal sebagai pengikut yang taat pada ajaran nabi. Selain itu, dalam hal perdagangan, antara orang-orang Arab dan Cina juga terdapat persaingan seputar usaha perdagangan tekstil yang mereka geluti. Namun demikian, orang-orang Arab lebih banyak bergaul dengan golongan mereka sendiri (Firdausya et al., 2015). Meskipun begitu, pada tahun 1930 penduduk etnis Arab di Jawa mengalami peningkatan jumlah sekitar 52.269 jiwa. Di bawah ini merupakan tabel 3 yang mendeskripsikan jumlah penduduk Asia lainnya termasuk penduduk etnis Arab berdasarkan sensus penduduk tahun 1930.

**Tabel 3. Data Penduduk Asia Lain (Arab) di Pulau Jawa berdasarkan SP 1930**

Wilayah	Tahun	Penduduk Asia Lain		
		L	P	J
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1920	5.370	4.205	9.575
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		3.471	2.970	6.441
<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		52	34	86
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		465	413	878
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		7.759	64.30	14.189
Jumlah		17.117	14.052	31.169
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1930	9.200	8.104	17.304
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		5.727	5.336	11.603
<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		109	93	202
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		764	711	1.475
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		11.538	10.687	22.225
Jumlah		27.338	24.931	52.269

Sumber: Data diolah dari *Volkstelling 1930 Deel I, II, III*

Penduduk kelas tiga yang merupakan kategori terendah diberikan kepada penduduk pribumi. Penduduk pribumi di Pulau Jawa diklasifikasikan menjadi dua

golongan, yaitu rakyat jelata atau *wong cilik* yang terdiri dari petani, orang desa, dan kampung, serta kelompok elit bangsawan atau priayi yang merupakan penduduk pribumi dengan pendidikan yang lebih baik dan berprofesi sebagai *pangreh praja* atau pegawai pemerintahan Kolonial Belanda (Niel, 1984). Namun, sebenarnya masih terdapat kelompok kecil lagi yang berada di atas golongan tersebut, yaitu golongan ningrat, tetapi masyarakat sering mengelompokkannya ke dalam golongan priayi karena golongan ini memang pada awalnya berkaitan erat sebagai sebutan kaum ningrat. Sebagian besar penduduk pribumi yang hidup di Jawa merupakan rakyat jelata atau *wong cilik* dengan persentase sejumlah 98 persen dari keseluruhan. Mereka sebagian besar menganut agama Islam dengan konsep spiritual animistik Jawa. Agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat Jawa berbeda dengan agama Islam yang ada di Timur Tengah.

Kemudian, dua persen dari penduduk pribumi termasuk ke dalam golongan elit bangsawan atau priayi. Golongan priayi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rakyat jelata atau *wong cilik*. Sebagian besar dari golongan ini memiliki pendidikan yang lebih tinggi karena mengenyam pendidikan modern *a la* Barat. Kebanyakan dari golongan ini berprofesi sebagai *pangreh praja* atau pegawai pemerintahan Kolonial Belanda, hingga menjadi penguasa lokal seperti bupati atau *regent*. Namun demikian, kebanyakan masyarakat sering melihat bahwa bupati merupakan keturunan raja-raja Jawa di masa lampau melalui gelarnya. Meskipun hal ini ada benarnya, mengingat akar leluhur kebanyakan para priayi yang dapat dilacak hingga raja-raja masa lalu, tetapi telah terjadi perubahan dengan ikut campur tangannya pemerintah kolonial dalam struktur birokrasi priayi. Nyatanya, bupati di Jawa yang diberi gelar seperti Raden Tumenggung atau Raden Mas merupakan gelar yang diberikan untuk kedudukan administrasi dari pemerintah kolonial, bukan menunjukkan asal keturunannya (Niel, 1984).

Sensus penduduk tahun 1930 mendeskripsikan bahwa penduduk pribumi yang tinggal di Pulau Jawa berjumlah 40.891.093 jiwa. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. Penduduk pribumi tersebut terbagi atas lima daerah meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, *Jogjakarta*, *Soerakarta*, dan Jawa Timur. Berikut tabel 4 tentang data penduduk pribumi di Pulau Jawa berdasarkan sensus penduduk 1930.

**Tabel 4. Data Penduduk Pribumi di Pulau Jawa berdasarkan SP 1930**

Wilayah	Tahun	Penduduk Pribumi		
		L	P	J
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1920	4.376.917	4.951.776	8.968.693
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		4.798.066	4.977.579	9.775.645
<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		619.803	650.791	1.270.594
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		1.000.051	1.029.792	2.029.843
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		6.062.321	6.321.615	12.383.936

Jumlah		16.857.158	17.571.553	34.428.711
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1930	5.392.618	5.646.732	11.039.350
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		5.362.008	5.603.572	10.965.580
<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		749.544	789.324	1.538.868
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		1.248.692	1.286.902	2.585.594
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		7.222.835	7.588.866	14.811.701
Jumlah		19.975.697	20.915.396	40.891.093

Sumber: Data diolah dari *Volkstelling 1930 Deel I, II, III*

Sensus penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1930, menghasilkan data jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Sensus penduduk tersebut merupakan sensus terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda setelah pertama kali pada tahun 1815. Hasilnya, jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 1930 berada di angka 41.718.364 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 1920 yang berada di angka 34.977.237 jiwa. Berikut tabel 5 yang mendeskripsikan jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 1930 berdasarkan hasil sensus penduduk 1930.

**Tabel 5. Data Jumlah Penduduk Pulau Jawa berdasarkan SP 1930**

Wilayah	Tahun	Jumlah Penduduk		
		L	P	J
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1920	4.504.002	4.696.444	9.200.446
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		4.866.646	5.038.434	9.905.080
<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		626.666	656.149	1.282.815
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		1.010.449	1.039.098	2.049.547
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		6.148.992	6.390.357	12.539.349
Jumlah		17.156.755	17.820.482	34.977.237
Jawa Barat/ <i>West Java</i>	1930	5.586.999	5.810.147	11.397.146
Jawa Tengah/ <i>Midden Java</i>		5.454.297	5.687.332	11.141.629
<i>Gouvernement Jogjakarta</i>		760.390	798.637	1.559.027
<i>Gouvernement Soerakarta</i>		1.264.167	1.300.681	2.564.848
Jawa Timur/ <i>Oost Java</i>		7.358.371	7.697.343	15.055.714
Jumlah		20.424.225	21.294.139	41.718.364

Sumber: Data diolah dari *Volkstelling 1930 Deel I, II, III*

### **Pemerintahan dan Politik Etis di Jawa**

Pada periode kekuasaan Kolonial Belanda di Jawa, secara administratif wilayah-wilayah di Jawa terbagi atas beberapa karesidenan yang terdiri dari beberapa *afdeeling* atau kabupaten. Karesidenan dibentuk secara formal di Pulau Jawa pada saat pemerintahan Komisaris Jenderal Baron Van der Capellen yang menjabat pada tahun 1819-1824 (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978). Karesidenan

dipimpin oleh seorang residen yang berasal dari orang-orang Eropa atau Belanda dan kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Jabatan bupati biasanya diduduki oleh golongan priayi dan disebut sebagai penguasa lokal atau raja-raja kecil di wilayahnya (Nuriansyah et al., 2022). Sebagai bupati, mereka mendapatkan gelar dari Pemerintah Kolonial Belanda karena status mereka sebagai pegawai pemerintah kolonial. Gelar yang diberikan tersebut antara lain Raden Adipati, Raden Tumenggung, dan Raden Mas Ingabehi (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), dimana gelar tersebut diberikan untuk menunjukkan kedudukan administrasinya. Meski pemberian gelar telah diakomodasi oleh pemerintah kolonial, tetapi pergantian bupati masih mempertahankan cara tradisional melalui keturunan, seperti jika bupati meninggal akan digantikan oleh anak laki-laki pertama dari istri resmi bupati, bukan selir.

Namun demikian, tidak semua *afdeeling* atau kabupaten di Pulau Jawa yang jabatan bupati akan diberikan secara turun-temurun. Hal ini disebabkan bupati merupakan pegawai kolonial yang digaji, dan terkadang mereka dipindah tugaskan ke daerah lainnya. Seperti Kabupaten Sukabumi yang baru dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1921, jabatan bupati diisi oleh keturunan penguasa Cianjur dan Sumedang (Sutherland, 1973). Kemudian, wilayah Meester Cornelis di Batavia jabatan bupati diduduki oleh pegawai Eropa karena dalam wilayah mereka sebagian besar penduduknya terdiri dari penduduk Eropa. Tetapi, para bupati pribumi tetap mengusahakan keturunan mereka agar tetap menjabat di wilayah tersebut dengan mengikuti perkembangan kebijakan pengangkatan bupati yang ditetapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Terkadang kebijakan tersebut menguntungkan bagi para keturunan bupati karena beberapa persyaratan sesuai dengan kriteria mereka. Seperti contohnya di Karesidenan Besuki, salah satu persyaratan untuk menjadi bupati adalah harus berwawasan luas terkait penduduk Madura dan mengerti bahasa Madura (Muarif, 2020).

Pada abad ke-19, surplus pendapatan yang berasal dari tanah koloni, termasuk Jawa dalam hal ini, diserap setiap tahun sebagai upeti ke dalam kas Kerajaan Belanda. Dari pembayaran upeti tersebut, Kerajaan Belanda dapat melakukan modernisasi dan membangun masyarakat borjuis yang sukses di negerinya. Van Deventer mendapatkan inspirasi bagi tulisannya yang didasarkan pada pandangannya terhadap politik penghisapan yang dilakukan oleh Kerajaan Belanda terhadap masyarakat Hindia Belanda. Dalam tulisannya, Van Deventer menganggap bahwa masyarakat Hindia Belanda sudah cukup menderita untuk memakmurkan ekonomi negeri Belanda (Susilo & Isbandiyah, 2018). Kemudian, dalam pidato tahunan kerajaan pada bulan September tahun 1901, Ratu Wilhelmina dari Belanda berbicara tentang "kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda" yang kemudian disebut sebagai "politik etis" (Sutherland, 1983). Pidato tersebut menjadi tanggal resmi dimulainya politik etis jajahan dan era kolonial yang baru (Niel, 1984).

Kebijakan politik etis yang diberlakukan pada tiga bidang, yaitu pendidikan, pengairan atau irigasi, dan perpindahan penduduk atau emigrasi. Namun demikian,

dalam pelaksanaannya tidak ada tekad baik dan keikhlasan karena mereka takut kritik dan takut menimbulkan perlawanan rakyat yang luas dan terus-menerus (Susilo & Isbandiyah, 2018). Salah satu kebijakan dari politik etis tersebut adalah akses pendidikan yang luas untuk penduduk pribumi, baik itu dari golongan priayi maupun rakyat jelata. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menyesuaikan *Hoofden Scholen* dengan sekolah menengah lainnya di tahun 1900 dan menjadi Sekolah Untuk Mendidik Pamong Pribumi (OSVIA). Kemudian, Snouck Hurgronje membimbing keturunan para priayi untuk masuk ke dalam pendidikan modern *a la* Barat dan berhasil. Keberhasilan tersebut salah satunya terdapat pada R.M.T. Koesoemo Oetoyo yang merupakan Bupati Ngawi 1902-1905 dan Jepara 1905-1925 yang menempuh pendidikan modern *a la* Barat (Sutherland, 1983).

Pada sisi yang lain, banyak penduduk pribumi yang tidak tertarik terhadap pendidikan modern *a la* Barat karena mereka berpendapat bahwa pendidikan dapat menjauhkan mereka dari kebudayaan dan kemungkinan bisa menyeret mereka untuk keluar dari agama Islam serta menjadi seorang Kristen. Memang secara tradisional, tatanan sosial masyarakat Jawa adalah agama (Kroef, 1952). Penerapan politik etis di Hindia Belanda, termasuk Jawa pada abad ke-20 mengakibatkan beberapa hal. Salah satunya, dalam hal pemerintahan lokal tradisional yang dipegang oleh bupati mulai dilakukan reformasi. Hal ini dikarenakan pengaturan politik tradisional dianggap sebagai penghalang sikap rasional terhadap pekerjaan (Geertz, 1984). Secara perlahan bupati mulai dikurangi kewenangannya dalam hal ekonomi, mereka dijadikan pegawai Pemerintah Kolonial Belanda yang menerima gaji serta diberikan hal-hal yang menunjukkan simbol kehormatan dan kedudukan mereka.

### **Munculnya Priayi Baru**

Kemunculan 'priayi baru' di Jawa tidak terlepas dari pemberlakuan politik etis oleh Pemerintah Kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda. Pemberlakuan politik etis, khususnya dalam bidang pendidikan melahirkan struktur sosial masyarakat Hindia Belanda yang modern. Terbukanya akses pendidikan yang luas bagi masyarakat pada saat itu melahirkan golongan terdidik atau kaum intelektual yang berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih baik. Golongan ini tidak terbatas pada orang Jawa saja, melainkan golongan heterogen karena terdiri dari berbagai kelompok seperti orang Cina, Arab, Indo-Eropa, dan orang Jawa dengan berbagai status sosialnya (Sutherland, 1983). Golongan ini dapat dikatakan sebagai kumpulan orang-orang yang keluar dari zona nyaman mereka untuk mencari peluang baru. Selain itu, golongan tersebut juga menimbulkan mobilitas sosial di kalangan masyarakat hingga disebut sebagai 'priayi baru'.

Hal tersebut sejajar dengan proses industrialisasi dan birokratisasi yang berjalan di Hindia Belanda pada saat itu. Selain itu kebanyakan dari mereka bekerja dalam bidang kedokteran, kehewanian, pertanian, pekerjaan umum, pendidikan, administrasi, pers, dan lain sebagainya (Kartodirdjo et al., 1987). Seperti dalam pekerjaan di bidang pers,

banyak dikuasai oleh orang-orang Cina peranakan. Padahal kebanyakan keturunan orang Cina peranakan bekerja dalam bidang keuangan dan perdagangan. Namun demikian, kemunculan pers oleh orang Cina peranakan memberikan pengalaman baru hingga melahirkan wartawan dan penyunting berita pribumi untuk pertama kalinya (Sutherland, 1983). Selain dalam bidang pers, contoh lainnya dalam bidang kedokteran dan pegawai pemerintahan merupakan bidang pekerjaan yang banyak diisi oleh masyarakat pribumi. Mereka yang lulus dari STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) atau sekolah “dokter Jawa” banyak bergerak dalam bidang kedokteran dan pegawai pemerintahan, yang mana sekolah ini juga menyumbang banyaknya golongan intelektual yang lahir (Niel, 1984). Banyaknya penduduk pribumi yang lulus dari STOVIA tidak lain karena kebutuhan Pemerintah Kolonial Belanda atas dokter untuk melayani kesehatan para pekerja buruh perkebunan di Deli.

Sebagai golongan intelektual yang disebut sebagai priayi baru, mereka memperlihatkan bahwa menjadi *pangreh praja* bukanlah satu-satunya jalan untuk memiliki status terpandang dan bentuk kehidupan yang baik. Mereka menunjukkan bahwa dengan melalui pendidikan, mereka juga dapat menjadi golongan terpandang di mata masyarakat. Mereka memiliki perannya masing-masing di berbagai daerah, seperti di kota-kota kecil atau desa. Selain itu mereka berperan sebagai alternatif terbatas pejabat pemerintah dengan wibawa yang cukup besar dengan kemudahan akses informasi. Semula pada tahun 1900-an, para *pangreh praja* atau priayi lama menjadi golongan terpandang, maka di tahun 1914 golongan terpandang tersebut bertambah oleh para intelektual, teknisi pemerintah, dan lain sebagainya (Niel, 1984). Kemunculan priayi baru ini menimbulkan tekanan bagi status sosial *pangreh praja*, karena *pangreh praja* dinilai gagal sebagai penghubung rakyat jelata atau *wong cilik* dengan pemerintah kolonial.

Di sisi lain, tidak ada pembagian kelas sosial yang mutlak antara priayi baru dengan *pangreh praja* atau priayi lama. Akses pendidikan yang terbuka bagi seluruh kalangan memberi dampak kepada rakyat jelata atau *wong cilik* yang memiliki pendidikan lebih baik dapat naik status ke tingkatan sosial yang lebih tinggi. Tidak hanya *wong cilik* saja, para priayi lama juga banyak yang memilih bermobilitas ke dalam golongan intelektual atau priayi baru (Sutherland, 1983). Para priayi lama yang bermobilitas ke dalam golongan intelektual tersebut keluar dari zona nyaman mereka atau kerangka *pangreh praja* dan kultur tradisional. Mereka-mereka yang bermobilitas ke dalam golongan priayi baru memiliki berbagai alasan mengapa melakukan mobilitas sosial tersebut, salah satunya yaitu tidak lagi merasa senang menduduki posisi yang telah disediakan bagi mereka.

Namun demikian, menjadi seorang priayi baru merupakan cita-cita utama yang diidam-idamkan oleh masyarakat pribumi pada saat itu meskipun status tersebut diperoleh melalui jalur pendidikan, bukan melalui status keturunan. Mereka yang merupakan golongan rakyat jelata atau *wong cilik* bermobilisasi menjadi golongan priayi baru akan menyesuaikan diri terhadap kehidupan priayi. Ada beberapa faktor yang

memudahkan mereka untuk beradaptasi seperti pendidikan yang mereka tempuh memberikan kesempatan untuk bergaul dengan keturunan priayi, suasana dan lingkungan pekerjaan yang lekat dengan kehidupan priayi, dan lain sebagainya. Munculnya golongan intelektual tentunya berakibat pula pada pengangkatan pegawai di berbagai dinas, baik itu lembaga pemerintahan maupun swasta dimana pendidikan menjadi unsur penting dalam penerimaan tersebut (Prayudi & Salindri, 2015). Namun demikian, posisi dari priayi baru berada di atas rakyat jelata atau *wong cilik* yang banyak berprofesi sebagai petani, nelayan, hingga pedagang. Mereka, para priayi baru memiliki berbagai keuntungan selain dari status sosial yang didapatkan, seperti perekonomian mereka memiliki taraf hidup yang lebih baik (Prayudi & Salindri, 2015).

### KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat mobilitas sosial masyarakat di Jawa pada rentang tahun 1900 hingga 1942 akibat dari penerapan politik etis. Penduduk di Pulau Jawa sangat beragam mulai dari orang Eropa, Cina, Arab, hingga pribumi dengan golongan *wong cilik* dan priayi. Bupati sebagai penguasa lokal tertinggi sering disebut sebagai priayi, raja kecil di wilayah mereka, dan *pangreh praja* atau pegawai kolonial yang digaji dengan jabatan yang bisa diberikan secara turun-temurun kepada keturunannya. Namun demikian, kebijakan politik etis yang dicetuskan pada tahun 1901 membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat pribumi, terutama struktur sosial masyarakat dengan munculnya priayi baru yang didasarkan pada pendidikan atau disebut golongan intelektual. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat menjadi sarana mobilitas masyarakat ke dalam status sosial yang lebih tinggi. Kemunculan priayi baru tersebut mengancam keberadaan para *pangreh praja* atau priayi lama, karena tidak adanya sekat yang jelas antara mereka dan *pangreh praja* yang dinilai gagal sebagai penghubung antara *wong cilik* dengan pemerintah.

### DAFTAR RUJUKAN

- Departement Van Economische Zaken. (1934a). *Volkstelling 1930 Deel II Inheemsche Bevolking Van Midden-Java En De Vorstenlanden* (Volume II). Departement Van Economische Zaken. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:1110477>
- Departement Van Economische Zaken. (1934b). *Volkstelling 1930 Deel III Inheemsche Bevolking Van Oost-Java* (Volume III). Departement Van Economische Zaken. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:1103217>
- Departement Van Landbouw Nijverheid En Handel. (1933). *Volkstelling 1930 Deel 1 Inheemsche Bevolking Van West-Java* (Volume I). Departement Van Landbouw Nijverheid En Handel. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:1085284>
- Firdausya, A. R., Sugiyanto, & Sumardi. (2015). Perkembangan Kehidupan Sosial dan Kebudayaan Masyarakat Keturunan Etnis Kampung Arab Besuki Kabupaten Situbondo Tahun 1881-2014. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Geertz, C. (1984). Culture and Social Change : The Indonesian Case Author. *Man*, 19(4), 511-532. <http://www.jstor.org/stable/2802324>
- Kartodirdjo, S., Sudewo, A., & Hatmosuprobo, S. (1987). *Perkembangan Peradaban*

- Priyayi. Gadjah Mada University Press.
- Kroef, J. M. van der. (1952). Structural Change in Indonesian Society. *Economic Development and Cultural Change*, 1(3), 216–228.  
<https://www.jstor.org/stable/1151620>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Muarif, S. (2020). Strategi Regenerasi Kekuasaan Oleh Bupati-Bupati di Panaroean Jawa Timur 1870-1942. *Humaniora Dan Era Disrupsi*, 1(1), 696–708.  
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download/20029/8781>
- Niel, R. van. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Dunia Pustaka Jaya.
- Nuriansyah, J. S., Aninditya, I., Ramadhani, M. Y. P., Iva, H. F., & Ramadhan, R. S. (2022). Dari Besuki ke Bondowoso : Perkembangan kawasan frontier terakhir di Jawa 1800-1930. *Historiography: Journal Of Indonesian History and Education*, 2(4), 472–486.
- Prayudi, G., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942. *Publika Budaya*, 3(1), 20–34.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (1978). *Sejarah Daerah Jawa Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
<https://play.google.com/books/reader?id=Jf57CgAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=id>
- Susilo, A. &, & Isbandiyah. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Historia*, 6(2), 403–416.
- Sutherland, H. (1973). Notes on Java's Regent Families : Part I. *Indonesia*, 16(16), 112–147. <https://www.jstor.org/stable/3350649>
- Sutherland, H. (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Penerbit Sinar Harapan.
- Wertheim, W. F. (1955). Changes in Indonesia's Social Stratification. *Pacific Affairs*, 28(1), 41–52. <http://links.jstor.org/sici?sici=0030-851X%28195503%2928%3A1%3C41%3ACI%3E2.0.CO%3B2-U>